

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan etnis Rohingya sejak lama membara di Myanmar, menyebabkan banyaknya orang Rohingya mengungsi dari tempat tinggal mereka. Banyak rumah dan desa yang pernah dihuni oleh etnis Rohingya kini hancur. (Jati,2018) mengatakan, krisis yang menimpa Rohingya dapat digambarkan sebagai krisis kemanusiaan terburuk sejak krisis Vietnam tahun 1970-an. Diskriminasi terhadap Rohingya tidak hanya didasarkan pada sentimen agama tetapi juga pada kepentingan politik dan ekonomi. Hingga tahun 2000, di bawah pemerintahan militer Myanmar, Rohingya mengalami diskriminasi besar-besaran. Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar ditunjukkan dengan perampasan tanah dari Rohingya dalam pembangunan perumahan bagi komunitas Buddhis. Pada 2017, militer Myanmar berusaha menghilangkan etnis Rohingya. Dalam hal ini, militer Myanmar berusaha mengusir Rohingya dari Rakhine State. Rohingya kemudian melarikan diri ke Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Etnis minoritas Rohingya, telah menjadi sasaran kekerasan di Myanmar selama beberapa dekade dan hidup dengan pembatasan ketat atas hak-hak mereka, termasuk kebebasan bergerak, menikah dan bekerja. Rohingya telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, tetapi pemerintah

Myanmar menolak untuk mengakui mereka sebagai warga Negara. Dengan itu Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 tidak memasukkan Rohingya diantara 135 kelompok etnis yang diberikan kewarganegaraan. Dan pemerintah sedang mempertimbangkan imigrasi ilegal Rohingya dari Bangladesh. Lebih dari satu juta orang Rohingya tinggal di Myanmar, dan sejak 2012 situasi Rohingya di Myanmar semakin memburuk. Kemudian, pada tahun 2012, 120.000 pengungsi masih tinggal di kamp-kamp pengungsi kumuh di Myanmar, dan 168.000 lainnya dikatakan telah melarikan diri melalui laut ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Rohingya memulai perjalanan yang sangat berbahaya. Selama itu mereka sering mati kelaparan dan kehausan, bahkan ada yang tenggelam. (Muhammad, 2016).

Di sini di Indonesia adalah salah satu negara yang dikunjungi oleh Rohingya untuk perlindungan. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah geografis yang sangat strategis dan merupakan negara yang dilalui oleh para pengungsi lintas batas. Hal ini karena Indonesia memiliki pelabuhan dan perbatasan dengan negara lain. Khususnya Kalimantan Barat dan Sabah di Malaysia, Australia di selatan dan berbatasan dengan Timor Timur. Ada 79 gerbang perbatasan resmi di Indonesia, yang terletak di luar Jalur Tikus, yang dikenal sebagai Jalur Barat dan Jalur Timur. Setelah itu, konflik Rohingya yang diawali dengan perang saudara di Myanmar, akhirnya menjadi masalah regional karena Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan menetap di negara lain. Kedatangan pengungsi Rohingya merupakan tanggung jawab bersama. Negara-negara yang menjadi sasaran pengungsi Rohingya, serta organisasi internasional dan komunitas internasional, telah bereaksi dan mengintimidasi kekerasan yang disaksikan oleh Rohingya.

Dalam konflik etnis Rohingya, Myanmar memutus semua akses ke komunitas internasional, tetapi Indonesia diberikan pengecualian. Akses Indonesia terhadap bantuan kemanusiaan di Rakhine *State* tidak terlepas dari hubungan baik antara KBRI Yangon dengan pemerintah Myanmar dan pemerintah negara bagian Rakhine setempat. Seiring dengan ketentuan bahwa Rohingya harus memiliki hak yang sama dengan masyarakat selayaknya. Seperti mendapatkan kewarganegaraan yang setara, perlakuan diskriminatif, dan etnis Rohingya juga tidak boleh disiksa dan harus diberikan hak atas kebebasan bergerak dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan terhadap Rohingya. Tindakan yang diambil melanggar prinsip perdamaian dan keamanan dunia, lebih lanjut, Dewan Keamanan PBB diharapkan mengambil tindakan segera dan tegas dalam kasus-kasus terhadap etnis Rohingya. Pelanggaran Hak Asasi Manusia atas Nama Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik etnis Rohingya, dan dari pernyataan DUHAM, pemerintah Myanmar telah melanggar hak asasi manusia dengan melakukan banyak pelanggaran, seperti hak untuk bergerak bebas dan di mana DUHAM terletak. Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa Suatu standar internasional yang disepakati dan diterima oleh bangsa-bangsa di dunia. Hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk menyiksa dan kelompok etnis Rohingya di bawah hukum internasional yang melarang hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta melindungi hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional

tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.

Untuk itu, pemerintah Myanmar tidak menganggap serius krisis etnis Rohingya, terutama krisis kemanusiaan yang telah berlangsung lama dalam konflik ini sehingga tampaknya dirancang untuk memecah belah etnis Rohingya, sejak konflik negara bagian Rakhine 2017, banyak tanggapan yang disampaikan kepada pemerintah Myanmar oleh masyarakat internasional, organisasi internasional, dan negara lain. Tanggapan yang ditangani berkisar dari kritik keras hingga bantuan kemanusiaan kepada Rohingya, tetapi pemerintah Myanmar secara efektif menutup semua akses ke pejabat asing setelah insiden tersebut (Arungbudoyo, 2017).

Menurut Andrey Sujatmoko juga memberikan definisi hak asasi manusia, hak yang dimiliki orang hanya karena mereka adalah manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena masyarakat memberikannya kepada mereka, bukan karena hukum positif, tetapi semata-mata karena martabat manusia. Menurut Pasal 3 Sujatmoko UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi dinyatakan. Yaitu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perbedaan manusia berdasarkan agama, suku, ras, golongan, status sosial, status ekonomi yang mengarah pada pengurangan atau penghapusan penyimpangan, penerapan atau penggunaan hak asasi manusia dan, kebebasan mendasar dalam kehidupan individu dan kolektif di semua bidang. , terutama sejak tahun 1978.

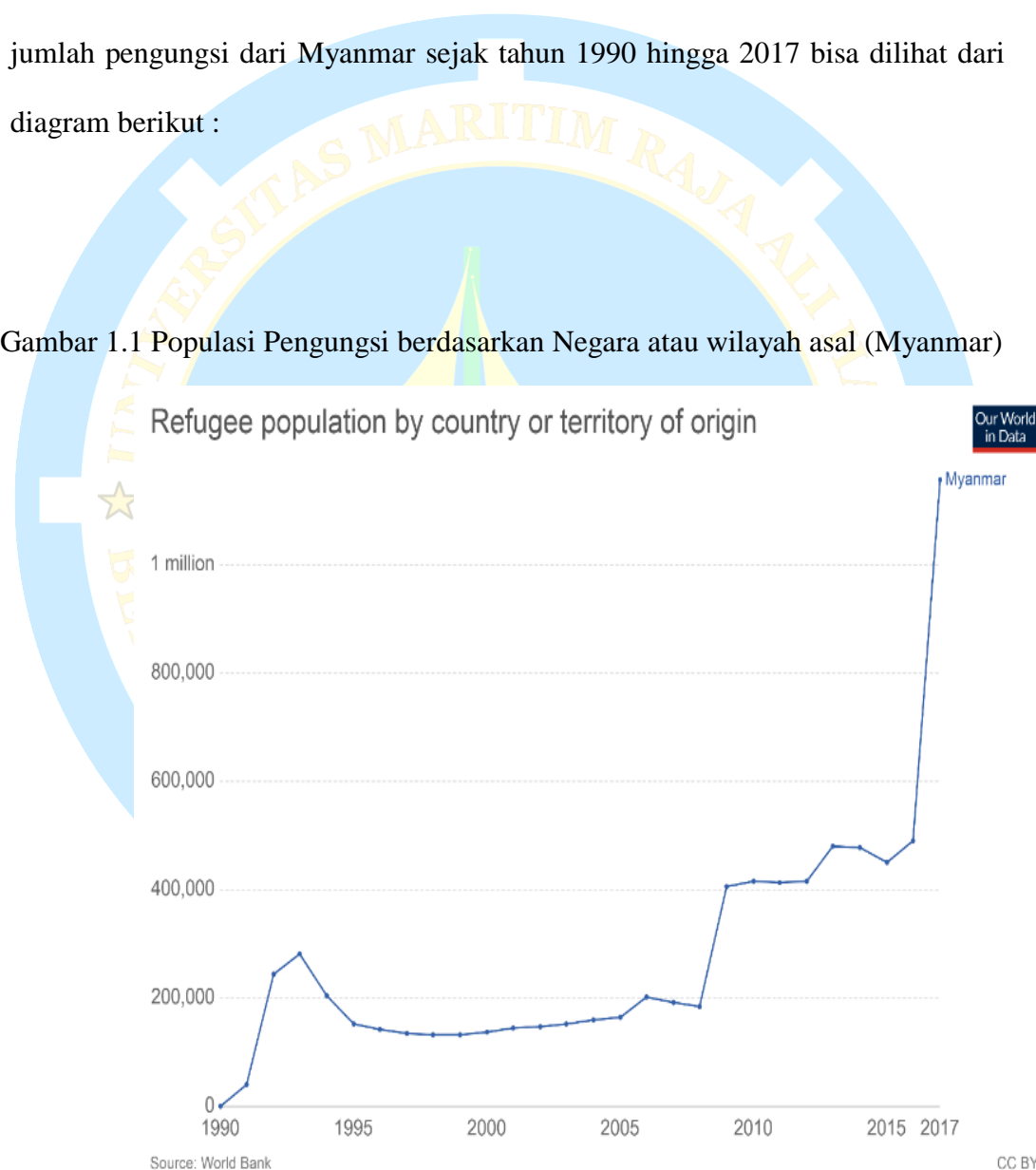
Lalu selanjutnya pada tahun 2012 Dunia Internasional diwarnai dengan perselisihan yang ada di Myanmar merupakan perselisihan etnis Rohingya, yang mana perselisihan yang ada di Myanmar sudah berjalan sejak lama tetapi media internasional baru memulai meliput pada tahun 2012 lalu menyebabkan Negara yang mendesak perbuatan pemerintah Myanmar. Lalu dampak berdasarkan respon dunia internasional perselisihan semakin memuncak yang terlihat dengan adanya pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran tempat tinggal masyarakat etnis Rohingya.

Lalu perselisihan etnis Rohingya dan Rakhine tidak mendapat titik temu. Solusi yang di jalankan oleh lembaga internasional maupun non-tradisional, dan negara-negara tidak menjamin perselisihan bisa teratasi. Bahkan semakin banyak kekerasan yang di rasakan para etnis Rohingya. Meningkatnya perselisihan etnis Rohingya pada tahun 2012 menyebabkan etnis Rohingya sampai kehilangan keluarga, rumah, bahkan harus mengungsi. Konflik itu terus menerus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya hingga meningkatnya jumlah pengungsi di beberapa Negara.

Kejahatan yang di hadapi oleh etnis Rohingya di Myanmar terus menerus. Hingga pada tahun 2017 kejahatan yang berlangsung menyebabkan banyak sasaran, yang dimana pada waktu seminggu bisa membunuh kurang lebih 400 orang (Muhaimin, 2017). Dan pada kurun waktu satu bulan total pengungsi etnis Rohingya pada bulan Agustus hingga September kisaran sekitar 123.000 orang (BBC, 2017). PBB juga mengatakan bahwa etnis Rohingya di Myanmar adalah kaum minoritas yang ada di dunia dan amat tertindas (Mangku, 2013). Justru total

pengungsi dari negara Myanmar pada tahun 2017 mengalami kenaikan angka yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu data yang diterbitkan oleh *Our World In Data* yang mengarah kepada data dari *World Bank* pada tahun 2017 jumlah pengungsi yang berasal dari Myanmar mencapai sekitar 1.156.732 orang (*Our World In Data, 2017*) ada pun perkembangan jumlah pengungsi dari Myanmar sejak tahun 1990 hingga 2017 bisa dilihat dari diagram berikut :

Gambar 1.1 Populasi Pengungsi berdasarkan Negara atau wilayah asal (Myanmar)



Sumber: Our World In Data, 2017

Berbagai macam pengucilan dan kejahatan yang dirasakan para etnis Rohingnya di Myanmar sudah sangat menunjukkan bahwa adanya pelanggaran tentang hak-hak yang harusnya didapatkan oleh setiap insan etnis Rohingnya. Yang mana hak dasar yang dimiliki sudah jelas tercatat dalam (*Universal Declaration of Human Rights*), tepatnya pada pasal 3, 5, dan 18. Dimana pasal 3 berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan hidup dan keamanan pribadi. Lalu pasal 5 yang berbunyi : tidak seseorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dan berikutnya adalah pasal 18 yang berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama: hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama mapun kepercayaan serta kebebasan baik sendiri ataupun bersama dengan orang lain di depan umum atau pribadi, memanifestasikan agama atau kepercayaan dalam ilmu pengetahuan, amalan ibadah serta ketaatan. (United Nations, 1948).

Sejak lima tahun ini banyak pengungsi Rohingnya dari Myanmar yang sampai sekarang masih terombang-ambing diberbagai Negara yang tanpa status yang jelas berikut adalah kronologis terhadap krisis etnis Rohingnya yang dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1.1 Kronologis Krisis Etnis Rohingya Dari Tahun 2017-2022.

Tahun	Kronologis Krisis Etnis Rohingya
2017	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 25 Agustus 2017 sekelompok militan Rohingya atau (ARSA) melakukan penyerangan dengan menewaskan kurang lebih belasan petugas. Serta militer Myanmar menggelar operasi didesa-desa, yang dimana militer berhasil membunuh 400 gerilyawan, Dan menurut PBB kurang lebih 1.000 orang yang tewas dalam waktu dua minggu. • Pada tanggal 5 September lebih dari 120.000 warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh serta sebelumnya sudah ada warga Rohingya dengan jumlah 200.000 • Pada 19 September pemimpin sipil Myanmar dan Aung San Suu Kyi melakukan perjanjian dalam pertanggungjawaban para pelanggar Hak Asasi Manusia • Pada 23 November Bangladesh dan Myanmar melakukan kesepakatan dalam memulangkan pengungsi.
2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 25 Agustus 2018 puluhan ribu pengungsi melakukan unjuk rasa dalam memperingati eksodus • Pada 03 September dua jurnalis Reuters dituduh melanggar undang-undang rahasia Negara Myanmar serta dijatuhi hukuman selama tujuh tahun. • Pada November terdapat upaya dalam memulangkan 2.260 pengungsi namun gagal karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan selamat.
2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 16 Juli Wangshington mengumumkan sanksi terhadap panglima militer Myanmar dan tiga perwira lainnya. Sekitar 3.500 pengungsi diizinkan kembali kerumahnya pada tanggal 22 Agustus. • Pada 11 November Gambia malakukan Gugatan di Mahkamah Internaisonal ICJ dengan menduga Myanmar melakukan Genosida terhadap Rohingya • Pada 11 Desember Gambia menjelaskan bahwa kasus di ICJ menunjukkan Aung San Suu Kyi secara personal memiliki tanggungjawab atas dapertemen terhadap pertahanan Myanmar.
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 23 Januari 2020 ICJ pemerintah Myanmar mengambil upaya dalam mendesak dalam pencegahan terhadap dugaan genosida serta melaporkan dalam kurun waktu empat bulan.
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 01 Februari 2021 militer Myanmar melakukan perebutan kekuasaan dengan menggulingkan pemerintahan sipil serta melancarkan aksi kekerasan terhadap aksi protes yang dilakukan negara tersebut. Serta Aung San Suu Kyi ditahan dibawah tahanan rumah serta dijatuhi hukuman selama 17 tahun.

2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 21 Maret Amerika Serikat resmi menyatakan bahwa kekerasan pada tahun 2017 merupakan tindakan genosida • Pada 22 Juli ICJ memutuskan bahwa kasus yang diajukan oleh Gambia bias dilanjutkan. Dan pada bulan yang sama Junta militer Myanmar juga mengeksekusi 4 tahanan dan dilakukan hukuman mati pertama di Negara tersebut setelah beberapa dekade terakhir. • Pada 10 Agustus terdapat 2 pemimpin komunitas Rohingya ditembak mati.
------	---

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

Kekerasan telah menjadi perhatian khusus pada Oktober 2016, dimana milisi Rohingya melancarkan gempuran dalam kadar kecil. Dan para pengungsi memfitnah kelompok keamanan Myanmar serta pasukan ekstrimis Buddha radikal membakar desa mereka. Paska serangan milisi Oktober, militer melancarkan serangan pembalasan yang sangat kejam, membuat masyarakat Rohingya merasa bahwa aparat keamanan melakukan tindakan kekerasan, termasuk pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran desa dan penyiksaan. Namun PBB telah menyatakan gempuran militer pada Rohingya pada Oktober tahun lalu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB mendefinisikan Rohingya merupakan minoritas agama dan bahasa dari Myanmar barat. Dan karena pemerintah Myanmar mengklaim mereka pendatang baru dari anak benua India, konstitusi negara tidak memasukkan mereka ke dalam komunitas yang menikmati kewarganegaraan mereka, mereka merasa menjadi bagian dan mengaku dianiaya oleh negara. Tetangga Bangladesh, yang telah menampung banyak pengungsi dari Myanmar, telah menampung ratusan ribu pengungsi, mengatakan tidak dapat menerima lebih banyak pengungsi. (IMAGES, 2017)

Pada tahun 2020 pada bulan juni akhir terdapat pengungsi etnis Rohingya yang terdampar diperairan Aceh Utara, dan para pengungsi dibawa oleh nelayan menuju daratan yang berjumlah 94 pengungsi, dan mereka juga menjalankan *rapid test virus corona*. Dari 94 pengungsi itu terdiri dari 49 orang perempuan, dan 30 orang anak-anak yang ditemukan terdampar disekitar empat mill dari pesisir pantai (Juned, 2020)

UNHCR, sebagai badan PBB, memuji Pemerintah Indonesia yang mengizinkan pendaratan yang dilakukan pada 31 Desember 2021. Pendaratan berlangsung selama beberapa hari pada 10 Desember 2021 terdapat 105 orang, terdiri dari 8 pria, 50 wanita, dan 47 anak-anak. Sebuah kapal telah terombang-ambing di perairan dekat perairan Aceh, Indonesia, selama sekitar tiga minggu dengan kapal yang tidak layak. Direktur UNHCR Indonesia Ann Meiman mengatakan tindakan penyelamatan jiwa selalu menjadi prioritas utama. Saya sangat berterima kasih kepada Indonesia, dan masyarakatnya telah menunjukkan semangat kemanusiaan mereka dengan menunjukkan Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menjadi contoh bagi negara-negara lain diberbagai kawasan. Indonesia menyelamatkan banyak pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2015, 2018 dan 2020, dengan penyelamatan terakhir pada tahun 2021, ketika 81 pengungsi Rohingya diselamatkan oleh Indonesia di lepas pantai Aceh Timur. (Lubis, UNHCR Indonesia, 2021)

Dan yang terbaru pada tahun 2022 terdapat 111 pengungsi Rohingya yang terdampar dipantai Aceh , yang dimana mereka terombang-ambing selama 40 hari

dilaut. Dimana dari 111 orang itu terdiri dari 65 laki-laki, 27 perempuan dan 19 anak-anak termasuk salah satunya (Idrus P. G., 2022)

Puncak penganiayaan yang terjadi pada tahun 2017 tidak hanya menciptakan krisis terhadap pengungsi melainkan juga dipandang sebagai aksi pembersihan etnis serta genosida. Lalu pada tahun 2022 ini tidak ada sumber data yang sangat signifikan yang menyatakan bahwa populasi dan penyebaran etnis Rohingya, tidak adanya data terbaru karena terjadi pergeseran isu Myanmar pasca Kudeta Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021. Tapi walaupun demikian dapat dilihat dari berbagai data bahwa saat ini terdapat setidaknya 1.700.000 etnis Rohingya yang tersebar di Sembilan Negara. (Christyanti, 2022)

Tabel 1.2 Jumlah Populasi Etnis Rohingya

NO	Negara	Jumlah Populasi Etnis Rohingya
1	Pakistan	350.000
2	Bangladesh	925.380
3	Malaysia	103.770
4	Saudi Arabia	300.000
5	India	18.000
6	UAE	10.000
7	Indonesia	900
8	Nepal	400
9	Thailand	100
	Total	1.708.550

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

Lalu terdapat bantuan yang diumumkan oleh beberapa aktor regional dan oleh badan internasional seperti Komisi Eropa. Sebagai organisasi kemanusiaan

dibawah Uni Eropa, organisasi tersebut telah memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya dalam bentuk dana yang disalurkan kepada 8000 pengungsi di lima tempat pengungsian yang berbeda. ECHO (*European Civil Protection And Humanitarian Aid Operation*) juga bekerja dengan IOM dalam masalah pengungsi. Menyusul perkembangan Krisis Manusia Perahu pada 25 Mei 2015, ECHO memperluas dukungan regional di Asia Tenggara, mendukung IOM dengan bantuan keuangan kepada Negara Indonesia (ECHO,2017)

Kebijakan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Pengungsi memuat ketentuan terhadap pemerintah Indonesia untuk membantu penyelamatan dan membantu para pengungsi dari kapal-kapal yang bermasalah di perairan Indonesia. Ketentuan (Idrus P. G., 2022)

Sudah diterapkan pada Tahun 2018, 2020, dan pada Juni 2021, dimana terdapat 81 pengungsi Rohingya berhasil di tolong dari perairan Aceh Timur. Dimana beberapa tahun Indonesia telah menjadi panutan terhadap negara-negara lain di kawasan dalam memberikan pertolongan terhadap pengungsi. UNHCR berharap dapat melihat kembali semangat kemanusiaan itu di Aceh hari ini. Selama beberapa dekade, Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan, penganiayaan dan pemindahan. Mereka yang mencari perlindungan internasional.

Staf UNHCR sekarang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan siap membantu pemerintah dan masyarakat dalam memberikan bantuan darurat untuk menyelamatkan jiwa kelompok. Serta berkoordinasi dengan mitra kemanusiaan lainnya untuk mempersiapkan respons yang komprehensif, termasuk proses

karantina sesuai dengan standar dan protokol kesehatan masyarakat internasional. (Prakitria, 2021)

Indonesia beserta anggota ASEAN lainnya juga telah mempertahankan inisiasi dan diplomasi etnis yang dimulai di Rakhine State tanpa kehilangan rasa hormat terhadap pemerintah berdaulat Myanmar. Bapak Joko Widodo memperhatikan keadaan Rohingya dengan mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas nama pemerintah Indonesia pada tahun 2017, tetapi hasil informasi dari *Institute For Policy Analysis Of Conflict* 2018 membuktikan bahwa pemerintahan Myanmar menolak permintaan bantuan kemanusiaan Indonesia. Dan Indonesia akan memprioritaskan bantuan yang diberikan kepada Rohingya. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dan bantuan dasar.

Indonesia juga memiliki kerja sama kemanusiaan untuk Rakhine State. Selain mengakui kepentingan diplomasi Indonesia dalam membantu Rohingya menyelesaikan masalah yang dihadapi Rohingya, penelitian ini mengeksplorasi diplomasi Indonesia dalam mempromosikan kepentingan kelompok etnis Rohingya di Myanmar dari perspektif hak asasi manusia internasional, menyelidiki bahwa Indonesia sendiri tidak hanya peduli dengan masalah ini, tetapi juga memiliki berbagai inisiatif kemanusiaan. Pemerintah Indonesia secara aktif terlibat dalam diskusi multilateral dan regional ketika menilai isu-isu terkait etnis Rohingya.

Indonesia dengan kedudukan sebagai Negara yang independen pada sistem internasional, pasti memiliki kepentingan atau tujuan tersendiri, utamanya dalam status penyelesaian konflik Rohingya yang terbukti bahwa adanya keterlibatannya

yang cukup tinggi dalam tekniknya. Dan bisa kita lihat terdapat kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pengungsi Rohingya cukup membebani bagi Negara berkembang seperti Indonesia seperti yang dikutip dari tulisan (Aspasia, 2015) yang tercantun dalam CNN Indonesia Wakil Presiden Indonesia saat itu adalah Yusuf Kalla, menyebutkan bahwa penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia dilakukan dengan jumlah dana sekitar Rp2,3 miliar dari anggaran Kementerian Sosial. Dan dana ini hanya bisa digunakan untuk mananggung pengungsi kurang dari 2000 orang, dan ini sangat berbeda dari target pengungsi yang datang. Tetapi dengan demikian Indonesia mendapatkan bantuan dari pihak asing yaitu salah satunya adalah Singapura yang memberikan sekitar Rp2,6 miliar bagi penampungan pengungsi.

Disamping pernyataan tersebut, bisa kita ketahui bahwa sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia pada upaya penyelesaian konflik Rohingya tetap menjadi prioritas. Biaya perumahan yang tinggi, adanya politasi bermotif identitas, hingga ancaman saporatisme dapat membahayakan kepentingan nasional Indonesia sebagai sebuah bangsa, selain itu Indonesia juga memiliki kepentingan ideologis yang mana bertujuan secara aktif dalam perdamaian dunia. Kedua persoalan tersebut kemudian dapat didamaikan melalui dasar-dasar diplomasi ala Indonesia yaitu politik luar negeri yang bebas dan aktif serta sejak kemerdekaan telah memiankan peran yang menentukan sebagai standar utama interkasi internasional. Berdasarkan prinsip- prinsip tersebut diplomasi juga dilakukan dengan cara persuasif yang sesuai dengan situasi yaitu Indonesia memberikan bantuan, baik itu

bantuan secara langsung, penyampaian proposal kemanusiaan, maupun dialog langsung dan personal baik itu oleh presiden maupun wakilnya

Lalu kebijakan yang bebas aktif memastikan bahwa Indonesia hadir membantu masyarakat Rohingya tanpa harus bersikap agresif kepada pemerintah Myanmar dan terus aktif bekerja untuk perdamaian dunia. Selain itu lewat bantuan pengembangan dan dialog dengan pemerintah Myanmar, dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia khususnya di bagian ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam komunitas Rohingya yang bercita-cita agar bisa kembali ke negara asalnya Rakhine *state*. Dan kini Indonesia menjadi Negara yang diandalkan oleh pemerintah Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis Rohingya dan diharapkan dapat mendorong ASEAN untuk lebih mengamati persoalan Hak Asasi Manusia yang melintasi batas Negara. Oleh karena itu komitmen Indonesia untuk menangani konflik Rohingya adalah suatu bentuk perhatian terhadap kemanusiaan internasional. Keterkaitan Indonesia untuk terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini merupakan suatu langkah konkrit pemerintah Indonesia untuk mengakui citra positifnya dimata dunia.

Oleh karena itu Indonesia bisa menjadi Negara yang terdepan yang mampu menginvasi kedaulatan Myanmar melalui cara diplomasi sekaligus memberikan contoh partisipasi aktif dalam menjaga perdamaian di kawasan ASEAN khususnya bagi Negara-negara ASEAN nantinya. Suatu hal yang mana terdapat hal positif yang bisa dicapai pemerintah Jokowi dalam hal ini mampu memetakan arus domestik dalam negeri termasuk isu Rohingya dalam kepentingan politik jangka

pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu bantuan kemanusiaan yang ditawarkan tidak hanya terbatas pada moralitas saja tetapi juga bermanfaat untuk menstabilkan kawasan. Karena sangat masuk akal bagi Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Negara lain. Lalu langkah pemerintah Indonesia agar mendapat beberapa pengakuan dari para pemimpin Negara sahabat dan para pemimpin lembaga atau organisasi internasional yang bergerak pada bagian kemanusiaan

Kemudian sebuah Negara di Asia Tenggara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap kejadian di Myanmar, maka langkah Indonesia bukanlah sebagai tekanan melainkan lebih kepada upaya dalam kerjasama pada pembangunan inklusif dan peningkatan kapasitas dalam membantu Myanmar. Dan saat ini Indonesia telah berupaya membangun empat sekolah dasar di Rakhine, dua di muslim dan dua di daerah non-muslim, selain itu juga terdapat bantuan pangan satu juta dolar, dan dalam waktu dekat akan segera membangun rumah sakit di Rakhine dengan luas tanah 4.000 meter dan menelan biaya sekitar tiga miliar.

Kemudian pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melakukan resolusi konflik dengan mengadakan kunjungan langsung ke lokasi kejadian lalu meminta penjelasan secara rinci mengenai konflik yang sedang berlangsung dan memulai pembahasan berbagai alternatif penyelesaian. Meskipun sejauh ini belum ditemukan solusi nyata bagi Rohingya, namun pemerintah Myanmar telah berjanji dalam beberapa kali pertemuan dan negosiasi dengan para pemimpin masyarakat Myanmar bahwa secara bertahap akan memperhatikan hak-hak baru yang juga

dapat diperoleh etnis minoritas Rohingya, meskipun pemerintah Myanmar ragu untuk memberikan kewarganegaraan penuh kepada kelompok etnis Rohingya yang selama ini terdiskriminasi. Selama konflik Rohingya belum berakhir. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membantu para pengungsi imigrasi etnis Rohingya. Selain membangun tempat penampungan darurat dan menyiapkan keputusan presiden tentang keimigrasian pengungsi, pemerintah juga telah berupaya membangun jembatan antara pengungsi dan pemerintah Negara asalnya. Krisis Rohingya di Myanmar menunjukkan bahwa krisis tersebut memiliki akar sejarah yang panjang. Dan menifestasi krisis rohingya mencerminkan bahwa fokus nilai-nilai HAM di Asia Tenggara yang memfokuskan dalam melindungi krisis Etnis Rohingya.

Dan strategi terbaru yang dilakukan yaitu “*implementasi five points consensus ASEAN*” yang dimana disampaikan oleh Menlu Retno pada acara *High-Level Side Event On Rohingya Crisis* di New York pada tanggal 22 September 2022. Menlu Retno menekankan tiga poin dari lima poin konsensus yang dimana poin satu sampai dengan tiga yang perlu dilakukan masyarakat internasional dalam penyelesaian krisis Rohingya yaitu:

- a. pertama dengan menciptakan situasi yang konstruktif dalam memulangkan pengungsi Rohingya,
- b. kedua yaitu memastikan terhadap perlindungan keamanan serta keselamatan para pengungsi Rohingya di Cox’s Bazaar,
- c. ketiga yaitu membawa kedamaian serta rekonsiliasi regional di Myanmar.

- d. Melakukan dialog dengan semua pemangku kepentingan utama
- e. Memperbolehkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar

Serta ASEAN juga memiliki peran penting terhadap pengembalian perdamaian dan stabilitas di Myanmar, dan dimana Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan kerja sama dengan para komunitas internasional dalam mencari solusi yang tetap berkelanjutan dalam penyelesaian krisis Rohingya. Lalu juga melakukan proses kolaborasi serta tanggung jawab bersama dalam mengatasi permasalahan krisis Rohingya, karena Indonesia sebagai *Co-host* dalam pertemuan *High- Level Side Event on Rohingya Crisis* yang diselenggarakan bersama dengan Bangladesh, Kanada, Gambia, Arab Saudi, Turki, Inggris, AS, serta Uni Eropa. (Indonesia, 2022)

Para pemimpin ASEAN juga melakukan pertemuan dengan Junta Myanmar Min Aung Hlaing di Jakarta dimana dalam pertemuan tersebut mencapai *five points consensus* yaitu bagaimana mengatasi krisis politik yang dihadapi Myanmar. Yang mana dalam pertemuan tersebut menyebutkan lima *consensus* yang harus mereka lakukan yaitu (AFP, 2021)

1. Penghentian kekerasan di Myanmar
2. Melakukan dialog konstruktif diantara semua pihak dalam mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
3. Melakukan mediasi yang difasilitasi oleh ketua ASEAN dengan bantuan Sekjen.

4. Melakukan bantuan kemanusiaan yang didapatkan oleh Asean AHA Center
5. Melakukan kunjungan serta melakukan delegasi khusus ke Myanmar dengan pihak yang terkait.

Presiden Joko Widodo juga menekankan mengenai implementasi lima poin *consensus* ASEAN dalam menyelesaikan masalah di Myanmar. Yang dimana Jokowi menengaskan untuk melakukan pendekatan ASEAN Terhadap Myanmar sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama terutama lima poin *consensus* tersebut (Rahadian, 2022)

Ketua Junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menyebutkan bahwa dari lima poin *consensus* yang telah disepakati dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam mengatasi krisis tersebut akan dijalankan pada tahun 2022. Dan dimana dalam pidato yang disampaikan Min Aung Hlaing di televisi pemerintah pada tanggal 12 Agustus 2022 mengatakan bahwa tahun ini semua poin-poin yang paling mungkin dari konsesus tersebut akan dilaksanakan di bawah kerangka kerja ASEAN (Yanuar, 2022)

Serta para Menteri Luar Negeri ASEAN akan terus menindak lanjuti mengenai implementasi 5PC yang telah disepakati oleh pemimpin ASEAN pada 24 April 2021 lalu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan permasalahan yang ingin peneliti bahas adalah :

1. Bagaimana strategi diplomasi multilateral Indonesia dalam penyelesaian krisis etnis Rohingya di Myanmar tahun 2017-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi diplomasi multilateral Indonesia dalam penyelesaian krisis etnis Rohingya di Myanmar tahun 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka peneliti berharap dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk penulis sendiri tetapi juga untuk semua orang, dan masyarakat luas yang membacanya. Yang dimana manfaat ini diklasifikasikan kedalam penelitian yang terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Yaitu dapat meningkatkan pengetahuan para pembaca dan peneliti mengenai strategi diplomasi multilateral Indonesia dalam mencapai kepentingan dalam penyelesaian krisis etnis Rohingya. Lalu sebagai suatu referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam suatu penyelesaian konflik, seperti konflik Etnis Rohingya

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini bisa mengembangkan kemampuan penulis. khususnya tentang berdiplomasi dengan Negara-negara yang bersangkutan dalam hal tertentu untuk mendapatkan sebuah keberhasilan serta menambah wawasan dan pengalaman pribadi dalam meneliti.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa menambah informasi atau wawasan yang lebih lengkap tentang strategi diplomasi multilateral Indonesia dalam mencapai suatu kepentingan terhadap krisis etnis Rohingya. Serta memberi manfaat pengetahuan bagi setiap kalangan masyarakat.

c. Bagi Peneliti lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi ataupun *referensi, literatur* yang bisa dijadikan pedoman tambahan bagi pembaca untuk bahan penelitian selanjutnya.